
PERANAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PERKEMBANGAN KOPERASI DI ERA INDUSTRI 4.0

Tiris Sudrartono
Manajemen Bisnis, Komputerisasi Akuntansi, Politeknik Piksi Ganesha
tiris.sudrartono@gmail.com

Wiwi Warsiati
Administrasi Keuangan, Politeknik Piksi Ganesha
wiwiwarsiati@gmail.com

Masuk : 13-04-2021 , revisi : 03-06-2021 , diterima untuk diterbitkan : 08-06-2021

Abstract: National development, specifically economic development, is an important thing. So important that the progress of technology the government has also set 2020 as the year in which Indonesia is projected to be the country with the largest digital economy in Southeast Asia Supported by a large population and with high levels of internet users, cooperatives must improve seriously. Cooperatives must be able to become cooperatives today by utilizing information technology in managing their business. With the technology-based application system, it is expected that service to members will be faster, safer, and more comfortable. When young entrepreneurs can see broader benefits with the present-day Cooperative, it is hoped that they will join this digital-based cooperative. To improve the stretching of cooperatives in the homeland, to implement good cooperative governance requires a real-time accounting system that can be quickly identified by financial indicators at any time. Financial statements must be made easy and systematic, accountable, accurate. The application must be user-friendly, feature, and complete web-based modules. It takes the cooperation of all parties. Not only the government, but also the business world, academics, and the wider community to create a more conducive business climate.

Keywords: Development of Cooperatives, Industrial Era

Abstrak: Pembangunan nasional, dan khususnya pembangunan perekonomian, menjadi suatu hal yang penting. Sedemikian pentingnya kemajuan teknologi sehingga pemerintah juga telah menetapkan tahun 2020 sebagai tahun dimana Indonesia diproyeksi menjadi negara dengan ekonomi digital terbesar di Asia Tenggara, didukung oleh besarnya jumlah penduduk serta dengan tingginya tingkat pengguna internet koperasi harus berbenah secara serius. Koperasi harus mampu menjadi koperasi zaman *now* dengan memanfaatkan teknologi informasi di dalam pengelolaan bisnisnya. Dengan sistem aplikasi yang berbasis teknologi tersebut diharapkan pelayanan terhadap anggota menjadi lebih cepat, aman, dan nyaman. Bilamana para pelaku usaha muda dapat melihat manfaat yang lebih luas dengan adanya koperasi zaman *now*, maka diharapkan mereka akan bergabung dalam koperasi berbasis digital ini untuk meningkatkan geliat koperasi di tanah air. Untuk menerapkan tata kelola koperasi yang baik dibutuhkan sistem akuntansi yang *real-time* yang setiap saat dapat diketahui indikator keuangan secara cepat. Laporan keuangan yang dibuat harus mudah dan sistematis, akuntabel, serta akurat. Aplikasi harus *user-friendly*, fitur, dan modul lengkap berbasis *web* dibutuhkan kerja sama semua pihak. Tidak hanya pemerintah, tapi juga dunia usaha, akademisi, dan masyarakat luas untuk menciptakan iklim usaha yang lebih kondusif.

Kata Kunci: Pengembangan Koperasi, Era Industri

PENDAHULUAN

Koperasi di Indonesia memiliki peranan yang baik untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian di masyarakat. Selain itu, koperasi membantu pemerintah dalam mengurangi tingkat pengangguran di Indonesia dengan terciptanya lapangan kerja baru bagi masyarakat sekitar koperasi tersebut didirikan terutama terlibat langsung menjadi anggota koperasi, sehingga dapat mendukung pendapatan rumah tangga masyarakat tersebut. Digitalisasi penting untuk berkelanjutan koperasi dalam menghadapi industri 4.0 harus mengubah secara sistematis pada tatanan pemerintahan dan pelaku usaha perlu perubahan menghadapi tantangan gerakan koperasi yang belum memberikan kinerja bisnis yang optimal (Larasati, 2020). Maka dari itu, pengembangan koperasi di Indonesia perlu dilakukan dengan dukungan pemerintah terutama pemerintah daerah yang berdekatan langsung dengan kegiatan usaha koperasi yang ada di masyarakat.

Teknologi digital telah menjadi bagian dari hidup kaum milenial dan sangat bergantung pada teknologi dan internet untuk seluruh kegiatan mereka kemajuan teknologi sehingga pemerintah juga telah menetapkan tahun 2020 sebagai tahun dimana Indonesia diproyeksi menjadi negara dengan ekonomi digital terbesar di Asia Tenggara (Dwipradnyana et al., 2020). USAID menetapkan indeks kinerja koperasi (*Cooperative performance index/CPI*) dimana terdapat lima dimensi dalam mengukur indeks tersebut yaitu (1) status hukum & strategi dan perencanaan koperasi; (2) struktur manajemen dan sistem akuntansi; (3) produksi dan kualitas input; (4) pengaruh pasar dan hubungan bisnis; (5) rekrutmen dan strategi retensi anggota (Dwipradnyana et al., 2020). Untuk meningkatkan geliat koperasi di tanah air, dalam menerapkan tata kelola koperasi yang baik dibutuhkan sistem digital yang setiap saat dapat diketahui indikator secara cepat, tepat, dan akurat serta dibutuhkan kerja sama dengan semua pihak.

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui peran pemerintah dan peran apa saja yang diharapkan masyarakat dari pemerintah desa sehingga koperasi dapat berkembang dan terus tumbuh di tengah masyarakat sehingga pemerintah desa dapat masukan langsung dari hasil penelitian ini sehingga arah kebijakan desa dalam pengembangan koperasi tepat sasaran.

TINJAUAN PUSTAKA

Pemerintah Daerah

Menurut Kansil dan Kansil (2008, p. 145), pemerintah adalah satuan anggota yang paling umum yang memiliki tanggung jawab tertentu untuk mempertahankan sistem yang mencangkupnya dan monopoli praktis yang menyangkut kekuasaan paksaannya. Menurut Djainuri (2019, p. 3), daerah adalah lingkungan pemerintah. Daerah diartikan sebagai bagian permukaan bumi. Pemerintahan modern pada hakekatnya adalah pelayanan kepada masyarakatnya dan menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap orang dapat mengembangkan kemampuan dan kreativitasnya. Sedangkan Wibawa dan Antarini (2020) dengan menerapkan sistem digital dapat memberikan ruang transparansi mendorong pula peningkatan sikap responsif para penyelenggara pemerintah daerah sehingga masyarakat merasakan kenyamanan memperoleh pelayanan pemerintah daerah.

Koperasi

Menurut Rudianto (2006, p. 3), "Koperasi adalah perkumpulan orang yang secara sukarela mempersatukan diri untuk berjuang meningkatkan kesejahteraan ekonomi mereka melalui pembentukan sebuah badan usaha yang dikelola secara demokratis". Koperasi juga merupakan lembaga ekonomi bagi anggota serta masyarakat disekitarnya, anggota tersebut mempunyai kepentingan yang sama dalam mendapatkan manfaat ekonomi yang sebesar besarnya. Tantangan baru koperasi tak sekedar cara berbisnis di era digital, melainkan juga mengubah *mindset* dalam sistem tata kelola secara menyeluruh. Bagaimanapun, koperasi harus melakukan reformasi total agar mampu melewati era Revolusi Industri 4.0. Koperasi harus mampu beradaptasi dan bertransformasi secara dinamis (Ermaya & Mulyana, 2020). Revolusi

4.0 menanamkan teknologi cerdas yang dapat terhubung dengan berbagai bidang kehidupan manusia sehingga mengubah banyak bidang kehidupan termasuk perkembangan sistem pada koperasi (Wipartini, 2020).

METODOLOGI PENELITIAN

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Berdasarkan hal tersebut terdapat 4 kata kunci yang perlu diperhatikan yaitu, cara ilmiah, data, tujuan, dan kegunaan. Cara ilmiah berarti kegiatan penelitian itu didasarkan pada ciri-ciri keilmuan yaitu dengan rasional, empiris, dan sistematis.

Metode Kuantitatif Diskritif

Metode dalam penelitian ini adalah kuantitatif deskriptif. Sugiyono (2016, p. 8) menjelaskan bahwa metode penelitian kuantitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivism, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Menurut Sugiyono (2016, p. 35), metode deskriptif adalah suatu rumusan masalah yang berkenaan dengan pernyataan terhadap keberadaan variabel mandiri, baik hanya satu variabel atau lebih (variabel yang berdiri sendiri). Jadi, dalam penelitian ini peneliti tidak membuat perbandingan variabel itu pada sampel yang lain, dan/atau mencari hubungan variabel itu dengan variabel yang lain.

Populasi dan Sampel

Dengan menghitung ukuran sampel yang dilakukan dengan menggunakan teknik Slovin menurut Sugiyono (2016, p. 87). Adapun penelitian ini menggunakan rumus Slovin karena dalam penarikan sampel, jumlahnya harus *representative* agar hasil penelitian dapat digeneralisasikan dan perhitungannya pun tidak memerlukan tabel jumlah sampel, namun dapat dilakukan dengan rumus dan perhitungan sederhana. Rumus Slovin untuk menentukan sampel adalah sebagai berikut:

$$n = \frac{N}{1 + N(e)^2}$$

Keterangan:

n = Ukuran sampel/jumlah responden

N = Ukuran populasi

E = Presentase kelonggaran ketelitian kesalahan pengambilan sampel yang masih bisa ditolerir

e = 0,1

HASIL DAN KESIMPULAN

Populasi dalam penelitian ini adalah jumlah kepala keluarga yang ada di RT 01 RW 29 Desa Cinunuk, Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung, berjumlah 377 kepala keluarga yang keseluruhannya merupakan anggota Koperasi SEJAHTERA yang bergerak dalam bidang usaha simpan pinjam dan toko koperasi. Untuk itu sampel yang diambil dari populasi harus betul-betul representatif (mewakili), maka jumlah sampel yang diambil akan dihitung dengan menggunakan rumus Solvin yaitu sebanyak 77 orang dengan perhitungan sebagai berikut:

$$n = \frac{N}{1 + N(e)^2}$$

n = jumlah sampel

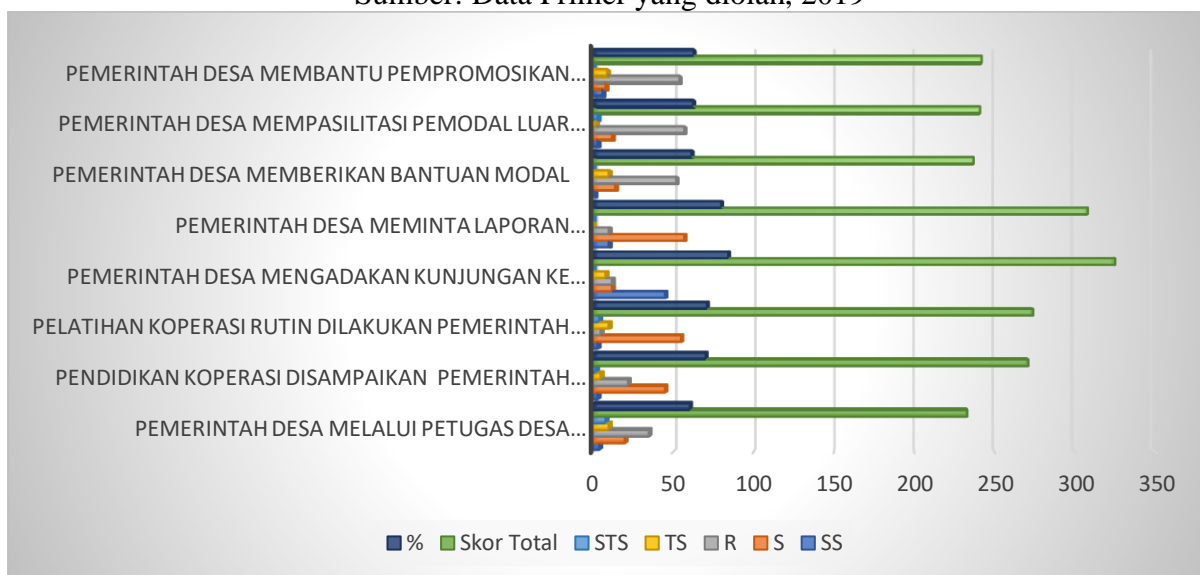
N = jumlah populasi

e = presentase kelonggaran ketidak telitian (presesi) karena kesalahan pengambilan sampel yang masih dapat ditolerir yaitu 0,1 atau 10%.

$$n = \frac{377}{1 + 377(0,1)^2} = 77,11 \text{ (77 orang)}$$

yang kemudian disesuaikan oleh peneliti menjadi 100 responden.

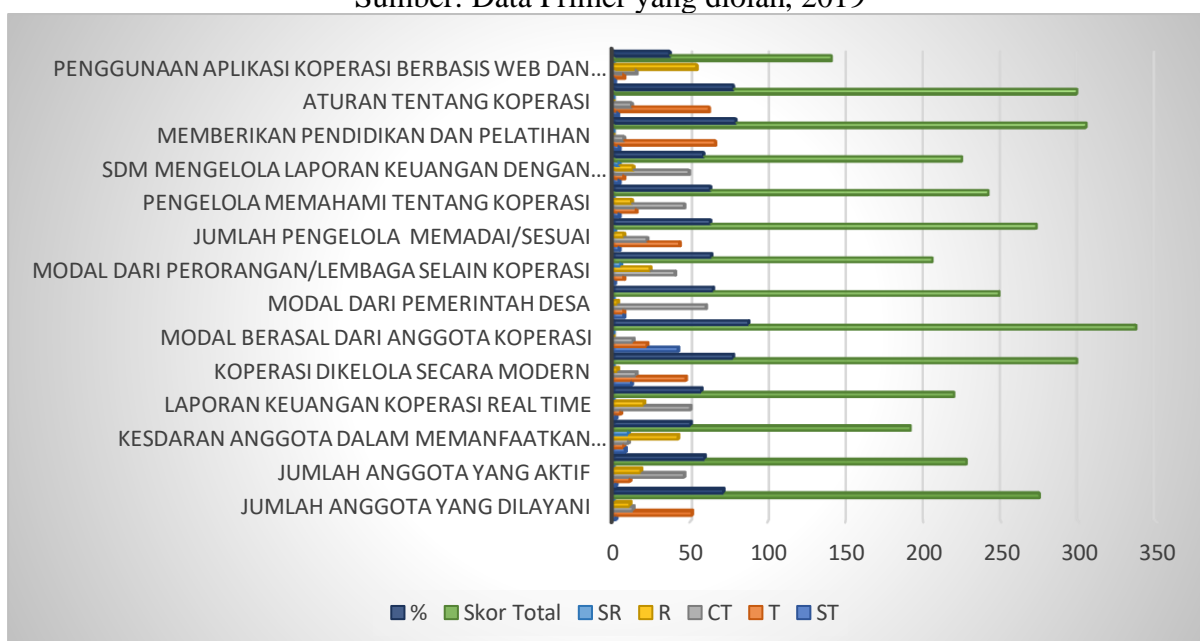
Gambar 1
Rekapitulasi Tanggapan Responden Tentang Peranan Pemerintah Desa
 Sumber: Data Primer yang diolah, 2019



Pada Gambar 1 secara keseluruhan responden menjawab bahwa pemerintah desa telah melakukan peranannya secara baik dengan nilai skor sebesar 2.131 poin atau sebesar 69,26%, artinya bahwa pemerintah desa dinilai baik oleh responden melalui 8 indikator pernyataan responden, namun dengan demikian terdapat indikator yang dinilai cukup oleh responden yaitu pemerintah desa melalui perangkat desanya melakukan bimbingan dan penyuluhan, pemerintah desa memberikan bantuan modal, pemerintah desa memfasilitasi pemodal dari luar koperasi, dan pemerintah desa membantu mempromosikan koperasi.

Dari empat indikator yang dinilai cukup oleh responden maka indikator-indikator tersebut tidak dirasakan langsung oleh responden peranannya dari pemerintah sehingga dinilai cukup oleh responden. Untuk itu diharapkan pemerintah lebih aktif lagi dan mencari cara agar peranan pemerintah desa bisa dirasakan oleh anggota koperasi misalnya dengan mengawasi langsung petugas yang diberi tanggung jawab dalam perkoperasian di desa tersebut.

Gambar 2
Rekapitulasi Tanggapan Responden Tentang Perkembangan Koperasi di era Industri 4.0
 Sumber: Data Primer yang diolah, 2019



Pada Gambar 2 secara keseluruhan responden menjawab bahwa perkembangan koperasi di era industri 4.0 dinilai cukup dengan nilai skor sebesar 2.491 poin atau sebesar 59,2% artinya bahwa perkembangan koperasi dinilai cukup oleh responden melalui 14 indikator pernyataan responden, namun dengan demikian terdapat indikator yang dinilai **rendah** oleh responden yaitu kesadaran anggota dalam memanfaatkan koperasi, dan penggunaan aplikasi *web*, dan internet dalam mengelola koperasi yang disarankan pemerintah daerah.

Dari dua indikator yang dinilai rendah oleh responden, maka indikator-indikator tersebut yang dianggap oleh responden koperasi menjadi tidak berkembang. Untuk itu diharapkan pengelola koperasi lebih aktif lagi dalam mengajak anggotanya dalam memanfaatkan koperasi dan pemerintah lebih aktif lagi melakukan bimbingan teknis dalam menggunakan teknologi digital berupa *web* dan jaringan internet dalam mengelola koperasi, misalnya dengan melakukan diklat langsung berupa pendidikan toko koperasi *online* oleh perangkat desa dan pengelola koperasi melakukan hal-hal yang kreatif agar anggota mau melakukan kegiatan ekonominya melalui koperasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Djainuri, E. A. (2019). *Sistem pemerintahan daerah*. Universitas Terbuka.
- Dwipradnyana, I. M. M., Pratiwi, I. G. A. M. A. M. A., & Diatmika, I. G. N. D. (2020). Strategi pengembangan koperasi di era digital pada koperasi yang ada di Provinsi Bali. *Majalah Ilmiah Universitas Tabanan*, 17(2), 112–116. <https://ojs.universitastaban.ac.id/index.php/majalah-ilmiah-untab/article/view/87>
- Ermaya, S. K., & Mulyana, I. (2020). Pelatihan berkoperasi untuk masyarakat di desa Cigugur Girang, Kabupaten Bandung Barat. *E-Coops-Day: Jurnal Ilmiah Abdimas*, 1(1), 1–14. <https://journal.ikopin.ac.id/index.php/ecoopsday/article/view/379/174>
- Kansil, C. S. T., & Kansil, C. S. T. (2008). *Sistem pemerintahan Indonesia*. Bumi Aksara.
- Larasati, R. A. (2020). *Digitalisasi penting untuk koperasi, ini sebabnya*. Kompas.Com. <https://money.kompas.com/read/2020/01/17/102000026/digitalisasi-penting-untuk-koperasi-ini-sebabnya>
- Rudianto. (2006). *Akuntansi koperasi: Konsep dan teknik penyusunan laporan keuangan* (S. Ubha (Ed.)). Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Sugiyono. (2016). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan R&D*. Alfabeta.
- Wibawa, I. G. A., & Antarini, L. (2020). Sistem digital tata kelola pemerintahan daerah (Digital local government). *Public Inspiration : Jurnal Administrasi Publik*, 5(1), 57–71. <https://doi.org/10.22225/pi.5.1.2020.57-71>
- Wipartini, Y. (2020). Peningkatan kapasitas sumber daya manusia koperasi untuk era industri 4.0 dan masyarakat 5.0. In *Bunga Rampai 2020: Peningkatan Koperasi dalam Menghadapi Industrial Era 4.0 and Society 5.0* (pp. 17–25). Institut Manajemen Koperasi Indonesia (IKOPIN).